

STRATEGI KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI PANDEMI GLOBAL COVID 19

Zudi Setiawan

Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Wahid Hasyim

Abstraksi

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini, warga negara di seluruh dunia diwarnai dengan persoalan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid 19) dan upaya menghadapinya. World Health Organization (WHO) memutuskan COVID-19 sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020. Setiap negara memiliki strategi kebijakan dalam menghadapi pandemi global Covid 19. Strategi tersebut ada yang sama dan juga berbeda di antara negara-negara di dunia, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi penyebaran Covid 19 yang terjadi di wilayahnya. Pemerintah Indonesia terus berusaha menekan penyebaran Covid 19 maupun pertumbuhan kasus infeksi Covid 19. Pemerintah secara top down membuat kebijakan publik untuk diimplementasikan oleh administrator publik kepada rakyat.

Kata Kunci: *strategi kebijakan, pandemi global Covid 19, pemerintah Indonesia*

A. Pendahuluan

Pada 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan dua kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia. Namun, Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menyebutkan virus corona jenis SARS-CoV-2 sebagai penyebab Covid-19 itu sudah masuk ke Indonesia sejak awal Januari. Pemerintah Indonesia merasa sudah cukup melakukan langkah-langkah antisipasi. Antara lain menggunakan Health Alert Card atau Yellow Card, juga Thermal Scanner untuk mengecek suhu tubuh diatas 38,5 derajat Celsius di pintu masuk dan keluar RI. Menurut Pandu, data laporan kumulatif kasus konfirmasi positif Covid-19 yang setiap hari ditemukan oleh pemerintah menunjukkan bahwa sejak Maret hingga April 2020, data grafik semakin meningkat signifikan di wilayah Sumatera Utara, Bali, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.¹

World Health Organization (WHO) memutuskan COVID-19 sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020. Artinya, virus corona telah menyebar secara luas di dunia. Istilah pandemi terkesan menakutkan tapi sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan keganasan penyakit tapi lebih pada penyebarannya yang meluas. Ingat, pada umumnya virus corona menyebabkan gejala yang ringan atau sedang, seperti demam dan batuk, dan kebanyakan bisa sembuh dalam

¹ Ellyvon Pranita, *Diumumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia dari Januari* dalam <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari> diakses 1 September 2021.

beberapa minggu. Tapi bagi sebagian orang yang berisiko tinggi (kelompok lanjut usia dan orang dengan masalah kesehatan menahun, seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, atau diabetes), virus corona dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Kebanyakan korban berasal dari kelompok berisiko itu.²

Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan berbagai kebijakan dalam menghadapi pandemic global Covid 19. Untuk memudahkan pemahaman tentang kebijakan publik (*public policy*) yang dikeluarkan oleh pemerintah, Bridgman dan Davis sebagaimana dikutip oleh Ismail Nawawi mengajukan lima karakteristik kebijakan publik yaitu: (1) memiliki tujuan yang didesain untuk dicapai atau tujuan yang di pahami; (2) melibatkan keputusan beserta dengan konsekuensinya; (3) terstruktur dan tersusun menurut aturan tertentu; (4) pada hahekatnya adalah politis; (5) bersifat dinamis.³

Pembuatan kebijakan publik merupakan suatu proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Menurut Budi Winarno, tahapan-tahapan yang harus dipenuhi dalam perumusan kebijakan publik terdiri dari: perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, dan penetapan kebijakan.⁴

Model kebijakan adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang dipilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu. Model kebijakan merupakan penyederhanaan sistem masalah dengan membantu mengurangi kompleksitas dan menjadikannya dapat dikelola oleh para analis kebijakan.⁵ Riant Nugroho mencatat bahwa setidaknya terdapat 14 (empat belas) model dalam perumusan kebijakan, di antaranya: Model Kelembagaan (*institutional*); Model Proses (*process*); Model Kelompok (*group*); Model Elit (*elite*); Model Rasional (*rational*); Model Inkremental (*incremental*); Model Pengamatan Terpadu (*mixed scanning*); Model Demokratis; Model Strategis; Model Teori Permainan (*game theory*); Model Pilihan Publik (*public choice*); Model Sistem (*system*); Model Deliberatif, dan

² Satuan Tugas Penanganan COVID-19, *Apa yang Dimaksud dengan Pandemi*, dalam <https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi> diakses 1 September 2021.

³ Ismail Nawawi, *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi, Teori dan Praktek* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 15-16.

⁴ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses* (Yogyakarta: Media Presindo, 2002), hlm. 28, 82-84.

⁵ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2003), hlm. 232-233.

Model Sampah (*garbage can*) Model-model ini seringkali digunakan pula untuk menganalisis kebijakan.⁶

Penulis mengambil teori Model Elit sebagai landasan dalam mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi pandemi Covid 19. Model Elit berasumsi bahwa dalam suatu masyarakat terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok elit yang memegang kekuasaan dan kelompok massa yang tidak memiliki kekuasaan. Rumusan kebijakan merupakan preferensi politik dari para elit yang berkuasa. Elit (pemerintah) secara *top down* membuat kebijakan publik untuk di implementasikan oleh administrator publik kepada rakyat banyak atau massa.⁷

B. Strategi Kebijakan Pemerintah Indonesia

Berikut ini beberapa kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi pandemi Covid 19

1. PSBB (Pembatasan Sosial Skala Besar)

PSBB (Pembatasan Sosial Skala Besar) merupakan kebijakan pertama yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi penyebaran Covid 19 pada bulan April 2020. Kebijakan ini diatur lewat Permenkes nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019. Dalam peraturan tersebut, Menteri Kesehatan berwenang untuk menetapkan PSBB di suatu wilayah. Setiap kepala daerah harus mengajukan usulan PSBB terlebih dahulu kepada Menkes. Dalam penerapannya, PSBB menutup semua kegiatan perkantoran dan industri non esensial. Termasuk pusat perbelanjaan. Pengetatan kapasitas kendaraan dan larangan makan ditempat bagi restoran dan rumah makan juga diterapkan dan diawasi dengan ketat.⁸

2. PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Jawa-Bali

Kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengatasi Covid-19 selanjutnya adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Jawa-Bali (PPKM Jawa-Bali). Kebijakan ini pertama kali diberlakukan hanya di wilayah Jawa-Bali mulai 11 sampai 25 Januari 2021. Saat itu, angka kasus Covid-19 melonjak pasca libur Natal dan Tahun

⁶ Penjelasan mengenai 14 (empat belas) model dalam perumusan kebijakan ini dapat dilihat dalam Riant Nugroho, *Public Policy* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 511-540.

⁷ *Ibid.* hlm. 515.

⁸ Ayu Rifka Sitoresmi, *6 Istilah Kebijakan Pemerintah untuk Atasi Covid-19*, dari PSBB Hingga PPKM, dalam <https://hot.liputan6.com/read/4638880/6-istilah-kebijakan-pemerintah-untuk-atasi-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm> diakses 1 September 2021

Baru. Sebelumnya, pemerintah DKI Jakarta sempat memakai istilah PSBB transisi. PSBB transisi merupakan fase pelonggaran dari PSBB awal. Secara aturan, PPKM Jawa-Bali lebih longgar dibandingkan dengan PSBB. Sejumlah kegiatan bisnis dan perkantoran sudah diizinkan beroperasi dengan syarat pembatasan kapasitas dan penerapan protokol kesehatan yang ketat.⁹

3. PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Mikro

Setelah hampir satu bulan menerapkan PPKM Jawa-Bali, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan kebijakan baru lagi yang disebut PPKM Mikro, dimulai 9 Februari 2021. Tujuannya, untuk menekan kasus positif dan melandaikan kurva sebagai prasyarat utama keberhasilan dalam penanganan Covid-19 dengan pengaturan di tingkat RT/RW. Dalam penerapan aturan ini, pemerintah mengeluarkan pembeda zona berdasarkan tingkat lingkungan. Aturan yang diberlakukan juga mengikuti label zona masing-masing lingkungan.¹⁰

4. Penebalan PPKM Mikro

Kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengatasi Covid-19 selanjutnya adalah Penebalan PPKM Mikro. Kebijakan ini diambil usai kasus Covid-19 melonjak pasca libur lebaran, berlaku 22 Juni-5 Juli 2021. Kebijakannya meliputi dine-in maksimal 25% dari kapasitas, WFO maksimal 25% bagi kantor di zona merah, larangan operasional tempat ibadah dan sekolah tatap muka di zona merah. Penebalan PPKM Mikro Pada pertengahan Juni, Pemerintah memberlakukan kebijakan Penebalan PPKM Mikro saat angka kasus Covid-19 terpantau kembali meningkat. Sejumlah aturan terkait kebijakan ini diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2021. Tak banyak berbeda, sejumlah aturan dalam masa penerapan kebijakan ini juga mengikuti label zona masing-masing lingkungan.¹¹

5. PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat

Kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengatasi Covid-19 selanjutnya adalah PPKM Darurat. Pasca libur hari raya Idul Fitri dan ditemukannya virus varian baru, varian Delta asal India, Presiden Joko Widodo mengumumkan penerapan aturan baru, yakni PPKM Darurat. PPKM darurat diklaim lebih ketat ketimbang PSBB dan PPKM mikro. Awalnya kebijakan ini hanya diberlakukan di Jawa-Bali. Namun, kemudian kebijakan serupa juga diterapkan di sejumlah wilayah lain.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

6. PPKM Level

Kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengatasi Covid-19 selanjutnya adalah PPKM Level. PPKM Darurat berakhir pada 20 Juli 2021. Presiden Jokowi kembali mengumumkan bahwa PPKM akan diperpanjang hingga 25 Juli 2021. Namun, pemerintah mengubah istilah PPKM Darurat, karena dinilai terlalu menyeramkan. Juru Bicara Vaksin Covid-19 Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmidzi menjelaskan, tingkat level yang disematkan pada suatu daerah akan menggambarkan kecukupan kapasitas respon sistem kesehatan, seperti kapasitas *testing*, *tracing*, dan *treatment* relatif terhadap transmisi penularan virus di wilayah tersebut.¹² Adapun penjelasan dari masing-masing level sebagai berikut:

Level 1 (Insiden Rendah)

Pada level ini, angka kasus konfirmasi positif Covid-19 kurang dari 20 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Kejadian rawat inap di rumah sakit juga kurang dari lima orang per 100 ribu penduduk. Kemudian angka kematian kurang dari satu orang per 100 ribu penduduk.

Level 2 (Insiden Sedang)

Angka kasus konfirmasi positif Covid-19 antara 20 dan kurang dari 50 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Kejadian rawat inap di rumah sakit antara lima dan kurang dari 10 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Angka kematian akibat Covid-19 kurang dari dua orang per 100 ribu penduduk.

Level 3 (Insiden Tinggi)

Level 3 menunjukkan suatu daerah memiliki angka kasus konfirmasi positif Covid-19 antara 50-100 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Kejadian rawat inap di rumah sakit 10-30 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Angka kematian akibat Covid-19 antara dua sampai lima orang per 100 ribu penduduk.

Level 4 (Insiden Sangat Tinggi)

Level 4 menandakan suatu daerah memiliki angka kasus konfirmasi positif Covid-19 lebih dari 150 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Kejadian rawat inap di rumah sakit lebih dari 30 orang per 100 ribu penduduk per minggu. Serta, angka kematian akibat Covid-19 lebih dari lima orang per 100 ribu penduduk di daerah tersebut.¹³

7. Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19

Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan kebijakan pengadaan vaksin dan pemberian Vaksin/Vaksinasi Covid 19 sebagai prioritas dalam penanggulangan pandemi Covid 19. Selama tahun 2020 terdapat beberapa negara yang telah melakukan vaksinasi, seperti: Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada. Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Program Pengadaan Vaksin dan

¹² Bimo Aria Fundrika dan Lilis Varwati, *Pengertian PPKM Level 4 Hingga 1: Indikator dan Cara Menentukan*, dalam <https://www.suara.com/health/2021/07/28/132500/pengertian-ppkm-level-4-hingga-1-indikator-dan-cara-menentukan?page=all> diakses 1 September 2021.

¹³ *Ibid.*

pemberian Vaksinasi Covid 19 sebagai bagian dari Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pemberian vaksin tersebut secara umum bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan Covid-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity), selain itu juga melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.¹⁴

Pemerintah menyiapkan beberapa instrumen hukum sebagai landasan hukum pengadaan vasin dan pelaksanaan vaksinasi Covid 19, diantaranya Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid 19, yang sudah direvisi dan diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 dan aturan pelaksanaan/turunan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid 19 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid 19.¹⁵

Dari beberapa strategi kebijakan yang diambil oleh pemerintah di atas, dapat dipahami bahwa rumusan kebijakan tersebut merupakan preferensi politik dari para elit yang berkuasa (pemerintah). Elit (pemerintah) secara *top down* membuat kebijakan publik untuk di implementasikan oleh administrator publik kepada rakyat.

¹⁴ Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Penanggulangan Pandemi Covid 19 Melalui Program Pengadaan Vasin dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19*, dalam <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/penanggulangan-pandemi-covid-19-melalui-program-pengadaan-vaksin-dan-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19> diakses 1 September 2021.

¹⁵ *Ibid.*

Daftar Referensi

Buku:

- Nawawi, Ismail. *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi, Teori dan Praktek* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009)
- Nugroho, Riant. *Public Policy* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011)
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses* (Yogyakarta: Media Presindo, 2002)
- Dunn, William N. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2003)

Media Online

- Ayu Rifka Sitoresmi, *6 Istilah Kebijakan Pemerintah untuk Atasi Covid-19 Dari PSBB Hingga PPKM*, dalam <https://hot.liputan6.com/read/4638880/6-istilah-kebijakan-pemerintah-untuk-atasi-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm> diakses 1 September 2021
- Ellyvon Pranita, *Diumumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia dari Januari* dalam <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari> diakses 1 September 2021.
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19, *Apa yang Dimaksud dengan Pandemi*, dalam <https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi> diakses 1 September 2021. Bimo Aria Fundrika dan Lilis Varwati, *Pengertian PPKM Level 4 Hingga 1: Indikator dan Cara Menentukan* dalam <https://www.suara.com/health/2021/07/28/132500/pengertian-ppkm-level-4-hingga-1-indikator-dan-cara-menentukan?page=all> diakses 1 September 2021.
- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Penanggulangan Pandemi Covid 19 Melalui Program Pengadaan Vasin dan Pelaksanaan Vaksinasi Covid 19*, dalam <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/penanggulangan-pandemi-covid-19-melalui-program-pengadaan-vaksin-dan-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19> diakses 1 September 2021.